

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Departemen Kehakiman RI. 1994. Laporan Akhir Pengkajian Tentang Aspek Hukum Perjanjian Build, Operate, and Transfer. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Departemen Kehakiman RI. 1995. Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perjanjian BOT (Build, Operate, and Transfer). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Gunardi. 2022. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Damara Press.
- H.S, Salim. 2014. Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni
- Muhaimin. 2020. Metode Penulisan Hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2017. Hukum dalam Pendekatan Filsafat. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. Metodologi Riset Hukum. Sukoharjo : Oase Pustaka.
- R, Subekti. 1981. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. Bandung: Alumni
- Sanusi, M. Arsyad. 2001. E-Commerce : Hukum dan Solusinya. Bandung: Mizan Grafika Sarana

ATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudirbio

Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014, LN.2020/NO.142, TLN NO.6523, Pasal 1 Nomor 14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Permendagri 19 Tahun 2016 BN 2024 (350), Pasal 1 Nomor 35

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KMK-04/1995 tentang Pemberlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerja sama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

JURNAL

Ali, Mohammad dan Mohammad Hifni. 2025. Analisis Yuridis Terhadap Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata Dalam Kasus Pengakhiran Suatu Perjanjian Karena Terjadi Wanprestasi. Jurnal Lex Generalis Vol. 6 (4).

Ambar, Marciano Rocky dkk. 2017. Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. Jurnal Diversi Vol. 3 (1).

- Ginting, Tasya Veronika Anrori dkk. 2025. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT.DKI). *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6 (9).
- Hanim, Lathifah. 2011. Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. XI.
- Jamilah, Lina. 2012. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku. *Jurnal Ilmu Hukum "Siyar Hukum" Fakultas Hukum Universitas Batik*. Vol XIII(1)
- Jamilah, Lina. 2012. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku. *Jurnal Ilmu Hukum "Siyar Hukum" Fakultas Hukum Universitas Batik* Vol. XIII (1).
- Kamilah, Anita. 2014. Kedudukan Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Dalam Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Vol.15 (1).
- Kamilah, Anita. 2014. Kedudukan Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Dalam Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Vol. 15 (1).
- Lubis, Taufiq Hidayat. 2022. Hukum Perjanjian di Indonesia. *Sosek : Jurnal Sosial dan Ekonomi* Vol. 2 (3).
- Marco, Lorenzo dan Gunawan Djajaputra. 2018. Pembatalan Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT) Antara Pemerintah Daerah Kota Bogor Dengan Pihak Swasta (PT Pancakarya Grahatama Indonesia) Ditinjau dari Sudut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Adigama*.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2003. Batas-Batas Kebebasan Berkontrak. *Yuridika* Vol.18(3)
- Nasution, Bahder Johan. 2014. Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Yustisia* Vol. 3 (2).
- Nurjamil, Siti Nurhayati. Build Operate And Transfer Agreements (BOT) On The Use Of Productive Waqf Hak Guna Bangun (HGB) In The National Islamic Economic Law Development. Vol 11(2).
- Orlando, Galih. 2022. Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyatul Bukhary : Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains* Vol. 6 (2).
- Pratama, Fajar Kusuma dan Budi Santoso. 2022. Kajian Yuridis Kerjasama Pemerintah dan Swasta Model BOT (Build Operate Transfer) Sektor Infrastruktur Jalan di Indonesia. *Jurnal Notarius* Vol. 15 (2).
- Salim, Ade Nugraha dkk. 2024. Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8 (1)
- Sancoko, Kristian Dwi, dkk. 2014. Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Build Operate Transfer Sebagai Bentuk Kemitraan Pemerintah Dengan Swasta Dalam Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Shalihah, Ghea Kiranti. Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. *Jurnal Lex Privatum* Vol. 10 (2).

- Sulistyaningrum, Helena Primadianti. 2020. Karakteristik Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) sebagai Bentuk Perjanjian Innominate. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 (1).
- Thamrin, Husni. 2017. Kajian Build Operate Transfer (BOT) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*. Vol. 1(3)
- Warouw, Jessica Eshter, dkk. 2021. Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis di Hadapan Pengadilan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*. *Jurnal Lex Privatum* Vol. 9 (10).
- Wicaksono, Isya Anung dan Fatma Ulfatun Najicha. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal* Vol. 5 (1).

SKRIPSI

- Sulaiman, Azhary Arsyad. 2015. ANALISIS WANPRESTASI PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER TERKAIT ADDENDUM PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

ARTIKEL

- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, “Di Forum ICI 2025, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Peran Swasta dan Mitra Internasional dalam Pembangunan Infrastruktur”, Juni 12, 2025.
- Nathasya Zallianty, “Sri Mulyani : Kebutuhan Infrastruktur Indonesia 2025-2029 Capai Rp. 10.151 Triliun, APBN Hanya Mampu Biayai 40 Persen”, *Kanal Ekonomi Balikpapan*, Juni 13, 2025.